

# Partisipasi Politik Perempuan Bangsa di Kota Medan

Desy Wulan Dari<sup>1\*</sup>, Zulkarnaen<sup>2</sup>, Aminuddin<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program studi Islam, Fakultas Ushuluddin, Pemikiran Politik Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author's e-mail: [desy3001243008@uinsu.ac.id](mailto:desy3001243008@uinsu.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1752 - 1759

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3565>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3565>

Article History:

Received: 21-07-2026

Revised: 06-08-2026

Accepted: 06-08-2026

**Abstract :** *Women's political participation is a crucial indicator for realizing an inclusive and equitable democracy. Although the government has implemented affirmative policies specifically a 30% quota for female representation women's involvement in politics continues to face various structural and cultural obstacles. This study aims to analyze the role of Perempuan Bangsa (an autonomous wing of the National Awakening Party, or PKB) in enhancing women's political participation in Medan City, as well as to identify the supporting and inhibiting factors involved. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed descriptively. The findings indicate that Perempuan Bangsa plays an active role in boosting women's political participation through political education, cadre development, leadership training, economic empowerment, and social community activities. Supporting factors include institutional backing from PKB, government affirmative policies, and rising political awareness among women. Conversely, inhibiting factors include patriarchal culture, limited economic resources, a lack of political experience, and restricted access for women to strategic political positions. From the perspective of Islamic political thought, women's political involvement is part of the effort to realize the common good (maslahah), justice (al-'adl), equality (al-musāwah), and consultation (syūrā). Therefore, synergy among organizations, political parties, the government, and the community is essential to strengthen political education and cadre development for women, ensuring that female representation becomes not merely quantitative but also substantive within the public policy-making process.*

**Keywords:** *women's political participation, Perempuan Bangsa, National Awakening Party (PKB), women's representation, Islamic political thought.*

**Abstrak :** Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota keterwakilan perempuan sebesar 30%, keterlibatan perempuan dalam politik masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perempuan Bangsa sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Medan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan Bangsa berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui pendidikan politik, kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Faktor pendukung meliputi dukungan kelembagaan PKB, kebijakan afirmatif pemerintah, serta meningkatnya kesadaran politik

perempuan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi budaya patriarki, keterbatasan sumber daya ekonomi, minimnya pengalaman politik, dan terbatasnya akses perempuan terhadap posisi strategis dalam politik. Dalam perspektif Pemikiran Politik Islam, keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan (al-'adl), persamaan (al-musāwah), dan musyawarah (syūrā). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara organisasi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan politik dan kaderisasi perempuan sehingga keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

**Kata Kunci:** partisipasi politik perempuan, Perempuan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, keterwakilan perempuan, Pemikiran Politik Islam.

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, maupun latar belakang sosial. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam politik menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun demikian, partisipasi politik perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural, sehingga keterwakilan perempuan dalam lembaga politik belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan gender.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan afirmatif. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mewajibkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pendirian maupun kepengurusan partai politik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman saling menolong dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah ayat 71. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran sosial yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik selama tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Rasulullah Saw. juga memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan sebagai mitra dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan bermartabat.<sup>3</sup>

Meskipun regulasi telah memberikan ruang yang cukup besar, realitas menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, stereotip gender, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, serta rendahnya kesempatan perempuan menduduki posisi strategis dalam partai politik. Kondisi tersebut menyebabkan keterwakilan

<sup>1</sup> Trisnani, *Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi*, Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 209–227.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah [9]: 71; Hadis Riwayat At-Tirmidzi No. 3895.

perempuan sering kali hanya bersifat administratif untuk memenuhi ketentuan regulasi tanpa diikuti oleh peningkatan peran substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu upaya memperkuat partisipasi politik perempuan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membentuk organisasi badan otonom Perempuan Bangsa. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah kaderisasi, pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan, serta pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Perempuan Bangsa tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan agar mampu berperan aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan nasional.<sup>5</sup>

Daerah Kota Medan, Perempuan Bangsa memiliki posisi strategis dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di tengah masyarakat yang heterogen. Melalui berbagai program pendidikan politik, kaderisasi, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi ini berupaya meningkatkan kesadaran politik perempuan sekaligus memperkuat kualitas kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Namun demikian, pelaksanaan berbagai program tersebut masih menghadapi tantangan berupa budaya patriarki, keterbatasan sumber daya organisasi, rendahnya literasi politik masyarakat, serta kompetisi politik yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menjadikan penelitian mengenai partisipasi politik Perempuan Bangsa di Kota Medan penting dilakukan untuk mengetahui strategi organisasi dalam meningkatkan keterlibatan perempuan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan program organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan strategi Perempuan Bangsa sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi organisasi dalam memperkuat keterwakilan politik perempuan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Pemikiran Politik Islam, studi gender, dan partisipasi politik perempuan, sekaligus menjadi masukan bagi partai politik dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik perempuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena partisipasi politik perempuan dalam organisasi Perempuan Bangsa Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus dan kader Perempuan Bangsa Kota Medan serta observasi terhadap berbagai kegiatan organisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Dan Pembahasan

1. Partisipasi Politik Perempuan Bangsa dalam Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan di Kota Medan

---

<sup>4</sup> Mayrudin, Yeby Ma'asan, Bayu Nurrohman, dan Dewi Sri Astuti, *Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-Partai Politik*, Ijd-Demos, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 1071–1090.

<sup>5</sup> Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa, *Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Perempuan Bangsa*, Hasil Musyawarah Nasional V, 2024.

Perempuan Bangsa Kota Medan sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui pendidikan politik, kaderisasi, pengembangan kepemimpinan, serta pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini menjadi wadah bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan kemampuan kepemimpinan sehingga mampu berpartisipasi dalam proses politik secara lebih aktif.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pendidikan politik dilakukan melalui sekolah kader, pelatihan kepemimpinan, seminar politik, diskusi kebangsaan, serta konsolidasi organisasi. Program-program tersebut bertujuan membangun kesadaran politik perempuan sekaligus meningkatkan kemampuan kader dalam memahami sistem politik, mekanisme pemilu, serta proses pengambilan kebijakan publik. Menurut Miriam Budiardjo, pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama partai politik dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran politik dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Dalam perspektif politik Islam, aktivitas tersebut sejalan dengan prinsip musyawarah (syūrā) yang menjadi salah satu landasan pemerintahan dalam Islam. Allah Swt. berfirman:

*"...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." (QS. Āli 'Imrān [3]:159).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan hendaknya dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.<sup>7</sup>

Selain melaksanakan pendidikan politik, Perempuan Bangsa Kota Medan juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pemberdayaan UMKM perempuan, penyuluhan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan terhadap perempuan dan anak. Program-program tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan elektoral, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan.<sup>8</sup>

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori fungsi partai politik yang dikemukakan Miriam Budiardjo, yaitu sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, dan agregasi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Perempuan Bangsa tidak hanya memperkuat basis politik PKB, tetapi juga menjadi media pemberdayaan perempuan dalam kehidupan demokrasi.<sup>9</sup>

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Perempuan Bangsa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Medan. Faktor pertama adalah adanya dukungan kelembagaan dari Partai Kebangkitan Bangsa melalui pembentukan organisasi Perempuan Bangsa sebagai badan otonom yang berfungsi melakukan kaderisasi dan pendidikan politik perempuan. Faktor kedua adalah adanya kebijakan afirmatif pemerintah yang mewajibkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan partai politik maupun pencalonan anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa, *Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) Perempuan Bangsa*, Hasil Musyawarah Nasional V (Jakarta: DPP Perempuan Bangsa, 2024), hlm. 12–18.

<sup>7</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 405–410.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS. Āli 'Imrān [3]: 159, hlm. 71.

<sup>9</sup> Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Perempuan Bangsa, 2024, hlm. 32–37.

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hlm. 160–168.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik perempuan, khususnya generasi muda, menjadi faktor pendukung yang turut memperkuat keterlibatan perempuan dalam organisasi politik. Pendidikan politik yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perempuan terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik sehingga mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat secara lebih luas.<sup>11</sup>

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang masih dihadapi organisasi. Hambatan utama berasal dari budaya patriarki yang masih berkembang di tengah masyarakat sehingga perempuan sering dipersepsikan lebih tepat menjalankan peran domestik dibandingkan terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu, keterbatasan modal ekonomi, pengalaman politik, serta jaringan politik menyebabkan kesempatan perempuan untuk bersaing dalam kontestasi politik masih relatif terbatas.<sup>12</sup>

Dalam perspektif politik Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan al-musāwah (persamaan), karena Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat berdasarkan kemampuan dan ketakwaannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 71.<sup>13</sup>

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan Bangsa Kota Medan telah menjalankan fungsi pendidikan politik, kaderisasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kepemimpinan perempuan secara cukup baik. Namun demikian, efektivitas organisasi dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan masih dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan struktur politik yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang setara bagi perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kaderisasi yang berkelanjutan, peningkatan pendidikan politik, serta sinergi antara organisasi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat agar keterwakilan perempuan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga secara substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik.<sup>14</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perempuan Bangsa Kota Medan sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki peran yang cukup strategis dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui berbagai program pendidikan politik, kaderisasi, pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbagai program tersebut mampu meningkatkan kesadaran politik, kapasitas kepemimpinan, dan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan didukung oleh adanya kebijakan afirmatif pemerintah mengenai keterwakilan perempuan, dukungan kelembagaan dari PKB melalui Perempuan Bangsa, serta meningkatnya kesadaran politik perempuan, khususnya di kalangan generasi muda. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain budaya patriarki, keterbatasan sumber

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Pasal 245. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Pendidikan Pemilih Berbasis Gender (Jakarta: KPU RI, 2022), hlm. 20–27.

<sup>12</sup> Putri, B. G. I., & Holilah, *Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik*, Indonesian Journal of Political Studies, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 90–116.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah [9]: 71, hlm. 198.

<sup>14</sup> Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 60–91.



daya ekonomi, minimnya pengalaman politik, dan belum optimalnya kesempatan perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam lembaga politik.

Dalam perspektif Pemikiran Politik Islam, keterlibatan perempuan dalam politik merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwah*), dan musyawarah (*syūrā*) sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara organisasi Perempuan Bangsa, partai politik, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan politik, kaderisasi yang berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif. Dengan demikian, peningkatan partisipasi politik perempuan tidak hanya tercermin dalam pemenuhan kuota keterwakilan, tetapi juga dalam kontribusi nyata perempuan terhadap proses pengambilan kebijakan dan pembangunan demokrasi yang berkeadilan di Kota Medan.

Berdasarkan saran hasil penelitian mengenai Partisipasi Politik Perempuan Bangsa di Kota Medan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

Pertama, Perempuan Bangsa Kota Medan diharapkan terus memperkuat program pendidikan politik, kaderisasi, dan pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik serta menduduki posisi strategis di lembaga legislatif maupun organisasi politik.

Kedua, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diharapkan memberikan dukungan yang lebih optimal kepada kader perempuan melalui peningkatan akses terhadap pendidikan politik, pendampingan, kesempatan menjadi calon pemimpin, serta pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat partai. Dengan demikian, keterwakilan perempuan tidak hanya memenuhi ketentuan kuota 30 persen, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam perumusan kebijakan publik.

Ketiga, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu terus memperluas program pendidikan politik yang responsif gender, memperkuat implementasi kebijakan afirmatif, serta menciptakan iklim politik yang lebih inklusif agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi.

Keempat, masyarakat diharapkan turut mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan dengan menghilangkan budaya patriarki dan stereotip gender yang masih membatasi ruang gerak perempuan dalam bidang politik. Dukungan keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sangat penting dalam mendorong lahirnya perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan integritas sebagai pemimpin.

Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai partisipasi politik perempuan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, melibatkan organisasi perempuan dari berbagai partai politik, atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul "Partisipasi Politik Perempuan Bangsa di Kota Medan". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materiel kepada penulis.
2. Rektor Universitas serta Dekan Fakultas yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
3. Ketua Program Studi dan seluruh dosen Program Studi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan selama masa perkuliahan.
4. Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, kritik, saran, serta motivasi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan jurnal ini.
6. Ketua Perempuan Bangsa Kota Medan beserta seluruh pengurus dan kader yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi selama proses penelitian berlangsung, khususnya kepada ibu Roma Uli Silalahi dan Ibu Lailatul Badri selaku anggota DPRD Kota Medan, dan seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai.
7. Tokoh agama yang telah memberikan pandangan, masukan, dan informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.
8. Sahabat, teman-teman seperjuangan, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, bantuan, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga Jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian politik Islam dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amareta Kristina Kesumadewi dan Dian Iskandar. 2022. "Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 9, No. 1, hlm. 380–392.
- Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa. 2024. *Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) Perempuan Bangsa*. Hasil Musyawarah Nasional V. Jakarta: DPP Perempuan Bangsa.
- Hanna Fenichel Pitkin. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press,
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2022. *Pendidikan Pemilih Berbasis Gender*. Jakarta: KPU RI.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. 2022. "Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-Partai Politik." *Ijd-Demos*, 4(3), 1071–1090.
- Miriam Budiardjo. 2019. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, B. G. I., dan Holilah. 2024. *Pemberdayaan Perempuan dalam Partai Politik*. *Indonesian Journal of Political Studies*, Vol. 4, No. 1, hlm. 90–116.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Trisnani. 2021. Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, 19(2), 209–227.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Zuldi Yariza Magribi Matondang dan Aprilinda M. Harahap. 2026 "The Position and Rights of Women in Political Parties in Indonesia (Case Study: Partai Kebangkitan Bangsa of North Sumatra)." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, hlm. 416–429.